

Mahfud MD Buka Suara soal Gaji Jumbo Anggota BPIP

Wishnugroho Akbar, CNN Indonesia | Senin, 28/05/2018 05:58 WIB



Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD menegaskan pihaknya tak pernah meminta gaji kepada pemerintah. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menyebut dirinya dan para anggota BPIP tak pernah mendapatkan dan meminta gaji dari pemerintah selama menjadi anggota dari lembaga tersebut.

Mahfud mengatakan hal tersebut menanggapi sorotan atas gaji besar anggota BPIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Dalam Perpres yang ditetapkan pada 23 Mei itu, anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji sekitar Rp100 juta. Sementara gaji Ketua Dewan Pengarah tercatat sebesar Rp112 juta. Untuk Kepala BPIP, Perpres 42/2018 menetapkan gaji sebesar Rp76 juta dan Wakil Kepala mendapatkan gaji Rp63 juta.

Lihat juga:

[BPIP Kini Setingkat Kementerian, Jokowi Bikin Senang Megawati](#)

"Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya "gaji" Pengarah dan Pimpinan BPIP. Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," kata Mahfud di akun twitter resminya, @mohmahfudmd.

BPIP berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 adalah hasil revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas BPIP di antaranya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Mahfud MD@mohmahfudmd

(BPIP-10) Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar.

[12:20 AM - May 28, 2018](#)

Lihat juga:

[Yudi Latief Tepis Anggapan Pembentukan BPIP Politis](#)

BPIP juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Yudi Latif saat ini menjabat sebagai Kepala BPIP. Sedangkan Ketua Dewan Pengarah BPIP dijabat Megawati Soekarnoputri dengan anggotanya antara lain Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.



Mahfud MD@mohmahfudmd

(BPIP-8) Kami tak pernah meminta gaji tapi Pemerintah sendiri yg menyediakannya stlh melihat kerja2 kami yg padat selama 1 thn. Hal itu tentu sdh dibuat sesuai peraturan per-undang2-an. Perpres ttg gaji itu dibahas oleh lintas kementerian dan BPIP tdk boleh ikut2 dlm soal itu.

[12:00 AM - May 28, 2018](#)

Mahfud melanjutkan dalam kicaunya bahwa di kalangan pimpinan BPIP seperti telah ada kesepakatan untuk tidak pernah meminta gaji. Dewan Pengarah juga disebutkan tak pernah mendapat bayaran satu rupiah pun dalam kerja-kerjanya.

Lihat juga:

Jokowi Bentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam setiap kegiatan, kata Mahfud, Dewan Pengarah dan anggota tidak dibiayai BPIP. Dia mengingatkan perkataan Megawati kepada para anggota Dewan Pengarah untuk menjaga diri agar tidak terkesan memakan uang negara. Apalagi sampai dipanggil KPK.

"Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji," kata Mahfud.

(wis)